



**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



Alamat: Jalan A. Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pada terdapat kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksanaan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas,



ERWAN MEGA KARYA LATIEF, SKM, MM

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 197005101995011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar yang meliputi pemberian rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari output pemberian pelayanan tersebut diharapkan dapat tercapai PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar, kesetaraan gender, perlindungan pada perempuan dan anak, dan tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status pembangunan desa.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.44.152.753.567 (empat puluh empat milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Balangan dengan realisasi anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.41.092.589.073 (empat puluh satu milyar Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh tiga rupiah) atau sekitar 93,07%.

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2023 yang meliputi sasaran indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan termasuk kategori Sangat Tinggi, yaitu 1 (satu) indikator berkategori tinggi, dan 3 (tiga) indikator kinerja yang berkategori Sangat Tinggi yaitu Indikator kinerja:

1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3. Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju

Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adalah "Sangat Tinggi" secara jelasnya (empat) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi yaitu sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya PPKS yang terpenuhinya kebutuhan dasar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58,95%	59,40%	100,76	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesetaraan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02	70,03	95,91	Tinggi

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2 %	52,63%	1,012%	Sangat Tinggi
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status Pembangunan desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	28,57%	81,16%	284,07%	Sangat Tinggi

Dalam melaksanakan pelayanan dasar terhadap Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentu memiliki kendala terutama masih belum tersistemnya data PPKS yang ada di Kabupaten Balangan serta belum dilaksanakannya pemuktahiran terhadap data yang tersedia saat ini, dari segi pemberdayaan perempuan masih adanya pragmatis yang ada dimasyarakat yang memiliki pandangan bahwa Wanita tidak boleh berdaya dan hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan bersifat kemasyarakatan dan sosial, peristiwa kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih banyak yang ditutup-tutupi oleh Masyarakat jika hal tersebut terjadi dilingkungan mereka tinggal. Dan pola pikir yang masih belum terbuka yang mengakibatkan setiap kegiatan untuk mendukung kegiatan Masyarakat yang berbasis ekonomi hadir di dalam Masyarakat sehingga dapat menjadi capaian indikator pemenuhan dari status sebuah desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pemerintah daerah bidang pelayanan dasar sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan dasar wajib dan non pelayanan dasar seperti bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan, peningkatan kualitas hidup Perempuan, perlindungan Perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan Masyarakat hukum adat serta tugas pembantuan yang diberikan oleh daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatankualitas hidup Perempuan, perlindungan Perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, peningkatan kualitas hidup Perempuan, perlindungan Perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan, peningkatan kualitas hidup Perempuan, perlindungan Perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan haka nak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan Masyarakat hukum adat.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Kepegawaian Umum, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh 3 (tiga) JF Pekerja Sosial Ahli Muda, Kepala Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana dibantu oleh 2 (dua) JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dibantu oleh 3 (tiga) JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa dibantu oleh 3 (tiga) JF penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Penataan Desa dibantu oleh 3 (tiga) JF Ahli Kebijakan Ahli Muda.

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang di Hadapi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dinas pelaksan teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Balangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase PPKS yang terpenuhi	67,25%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan sumber dana, sumberdaya	Dokumen Kependudukan yang dimiliki, dan	Belum optimalnya penyusunan

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

kebutuhan dasarnya			manusia, dan Database yang update	Partisipasi Masyarakat dan Keluarga	data yang tersistematis terkait pemuktahiran data PPKS yang tersedia,
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	92,11	PMDN 17/2021	Ketersediaan Sumber Dana untuk sosialisasi dan dukungan pimpinan	Partisipasi Masyarakat dan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat pentingnya kesetaraan gender dalam aspek kehidupan	Masih melekatnya budaya patriaki dilingkungan Masyarakat dan belum optimalnya kerjasama yang dibangun oleh beberapa organisasi sectoral dalam lingkup pemerintah daerah serta organisasi dari lintas sektor lain
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1,012%	PMDN 86 / 2017	Ketersedian sumber daya yang mendukung serta komitmen dalam pemberian pelayanan agar sistematis	Masyarakat yang takut untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan yang terjadi dilingkungan sekitarnya, permasalahan ekonomi sehingga membuat keluarga menjadi tempat	Masih belum tersedianya tenaga ahli baik secara psikologis klinis dan tenaga ahli bidang hukum dalam proses mendampingi anak dan Perempuan kasus kekerasan.

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

				yang nyaman bagi penghuni	
Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	183,8%	Analisis Mandiri	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan tata Kelola Pemerintahan Desa	Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.
Persentase data PPKS yang valid	25%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data agar dapat tersusun secara sistematis dan ketersediaan anggaran	Kondisi geografis dan Masyarakat yang dapat menerima dalam kegiatan pemuktahiran data PPKS	Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data agar dapat tersusun secara sistematis
Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	87,37%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data agar dapat tersusun secara sistematis dan ketersediaan anggaran	Kondisi geografis dan Masyarakat yang dapat memiliki kesadaran untuk dapat berkerjasama agara tercapainya tujuan pelayanan	Kondisi geografis dan Masyarakat yang dapat memiliki kesadaran untuk dapat berkerjasama agara tercapainya tujuan pelayanan
Persentase korban	100%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran	Kondisi cuaca, dan geografis	Kondisi cuaca, dan geografis

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

bencana yang terpulihkan kembali					
Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan anggaran dan pemuktahiran data PPKS	Keterlibatan Masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi	Ketersediaan anggaran dan pemuktahiran data PPKS
Persentase PSKS yang aktif	88,14%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan anggaran, monitoring dan evaluasi	Keikutsertaan PSKS dalam Pelayanan sosial	Keikutsertaan PSKS dalam Pelayanan sosial
Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	61,90%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi	Perempuan berani untuk berorganisasi dan berpartisipasi aktif	Ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi
Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	108,34%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran	Belanja ARG yang terdapat di masing-masing SKPD	Ketersediaan Anggaran
Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin	-	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi	Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Kegiatan Sosialisasi	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi

**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun					
Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak	30 orang	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi	Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Kegiatan Sosialisasi	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi
Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi	Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Kegiatan Sosialisasi	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	48,75	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi	Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Kegiatan Sosialisasi	Ketersediaan Anggaran dan sosialisasi
Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	85%	PMDN 86 / 2017	Ketersediaan Anggaran dan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemberdayaan	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.

**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

				Masyarakat Desa	
Persentase kerjasama desa yang terimplementasi	-	PMDN 86 / 2017	Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.
Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	38,02%	PMDN 86 / 2017	Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.	Apabila terdapat pemerintah desa yang tidak dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan.

1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada RENTRA K/L, implikasi RT RW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya SDM yang mengampu pelayanan sosial
2. Belum optimalnya PPKS dalam memanfaatkan bantuan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kebutuhan sasar bagi PPKS

4. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Pembangunan daerah yang berbasis gender
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan PUG di SKPD Kabupaten
6. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
7. Rendahnya akses, partisipasi dan peran Perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
8. Minimnya ketersediaan dan penggunaan data gender dan anak dalam siklus Pembangunan
9. Rendahnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak
10. Rendahnya partisipasi Perempuan dan anak dalam proses Pembangunan
11. Minimnya jumlah Lembaga yang melaksanakan perlindungan Perempuan dan anak
12. Minimnya jumlah dan kapasitas Lembaga pemenuhan hak anak (PHA) pada Lembaga pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha
13. Kurang optimalnya tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
14. Minimnya aparat pemerintah dan Lembaga kemasyarakatan yang terampil
15. Masih kurang berperannya Lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
16. Penguatan kapasitas Lembaga perekonomian Masyarakat desa/kelurahan belum maksimal
17. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) dan sarana prasarana pedesaan.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
7. Instruksi Presiden nomor 09 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
 17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tah2018).
 18. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan daerah Kabupaten Balangan
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.5 Sistematika Penulisan

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan 2023 ini terdiri dari 4 (empat) bagian sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Penjelasan umum organisasi, aspek strategis Organisasi serta permasalahan yang sudah dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja mencakup: Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja mencakup: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup mencakup: Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi Langkah-langkah di amsa mendatang untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka menengah pertama dari rencana jangka Panjang yaitu Rencana Strategis. Oleh karena itu, penetapan visinya harus mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Mengingat beberapa kondisi dan pemikiran tersebut, maka komitmen dan kesepakatan unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan harus tetap berada dalam koridor tahapan rencana Renstrada. Renstrada menetapkan pada tahun 2023 adalah tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, Dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan startegis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan . Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai kedudukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial perlindungan jaminan sosial dan penanganan bencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mempunyai kewajiban mewujudkan misik ke 4:

Dalam rencana strategis 2021-2026 disebutkan Visi dari Kabupaten Balangan adalah :

“Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”

dengan Misi

“Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif”

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, maka ditetapkan tujuan Pembangunan yakni meningkatnya infrastuktur wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan sasaran Pembangunan yaitu: meningkatnya sarana dan prasarna infrastruktur permukiman.

Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan da Program. Sebagai suatu

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan mafaat yang sangat penting bagi keberhasilan Pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan Pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pembangunan serta untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Tujuan RPJMD: Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial PPKS	Sasaran RPJMD: Terpenuhi kebutuhan dasar PPKS	Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	46,96%	52,95%	58,95%	85%	86,66%
			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase data PPKS yang valid	-	-	20%	40%	60%
			Indikator tujuan pada RPJMD Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	65%	67%	69%	71%	73%
			Indikator tujuan pada RPJMD Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100%	100%	100%	100%	100%
			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tujuan RPJMD: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Perempuan dan anak	Sasaran RPJMD: Meningkatnya kesetaraan gender	Indikator tujuan pada RPJMD: IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	70,77	72	73,02	74,04	75

			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	-	-	1,3%	1,6%	1,9%
			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	18	21	21,05	21,1	21,15
			Indikator tujuan pada RPJMD: Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak	30 Orang				
		Sasaran RPJMD: Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
			Indikator tujuan pada RPJMD: Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	14,1	14	13,9	13,8	13,7
			Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinannya pertama dibawah 18 tahun	17,86%	17,26%	16,56%	15,76%	14,36%
3	Tujuan RPJMD: Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa dan dukungan pemerintah desa terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan desa	Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase desa dengan klasifikasi desa maju	16,88	23,38	28,57	33,77	38,96

		Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	75 %	80%	85%	90%	95%
		Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase kerjasama desa yang terimplementasi	-	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
		Indikator tujuan pada RPJMD: Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	45%	50%	55%	60%	65%

2.2 INDIKATOR KINERJA (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Sosial, Pembersayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021. Hal ini telah dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Balangan Tahun 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya PPKS yang terpenuhinya kebutuhan dasar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	Untuk dapat terpenuhi pelayanan dasar urusan sosial	Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah total PPKS x 100%	Kepala Dinas	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bencana Alam, Pemberdayaan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

2	Meningkatnya kesetaraan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indikator ini menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi dibidang ekonomi dan politik.	IDG : 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Kepala Dinas	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Balangan Indikator ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Balangan 	Jumlah kasus kekerasan anak dan Perempuan tahun lalu – Jumlah kasus kekerasan Perempuan dan anak <u>Tahun ini</u> Jumlah kasus kekerasan Perempuan dan anak tahun lalu x 100%	Kepala Dinas	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status Pembangunan desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju			Kepala Dinas	Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan

						Kerjasama Desa
--	--	--	--	--	--	-------------------

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun yang terjadi menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagai mana yang tertuang dalam Pernjaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas SOSIALPPPAPMD

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PPKS yang terpenuhinya kebutuhan dasar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58,97%
2.	Meningkatnya kesetaraan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02
3.	Meningkatnya upaya perlindungan pada perempuan dan anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2%
4.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status Pembangunan desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	28,57%

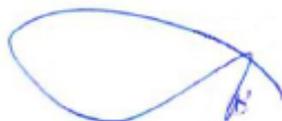
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 302.605.200	Rp. 4.202.610.200	APBD-P
2.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 368.028.200	Rp. 394.108.200	APBD-P
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.474.881.837	Rp. 2.515.651.537	APBD-P
4.	Penanganan Bencana	Rp. 517.139.600	Rp. 566.993.600	APBD-P
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 27.350.200	Rp. 89.297.600	APBD-P
6.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 859.542.600	Rp. 851.929.700	APBD-P
7.	Perlindungan Perempuan	Rp. 24.324.800	Rp. 72.244.400	APBD-P
8.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 105.536.300	Rp. 159.045.900	APBD-P

9.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 59.362.400	Rp. 62.182.400	APBD-P
10.	Pemenuhan Hak Anak	Rp. 120.939.200	Rp. 157.283.200	APBD-P
11.	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Rp. 74.867.200	Rp. 90.027.200	APBD-P
12.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 4.088.559.000	Rp. 9.075.229.800	APBD-P
13.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.442.834.500	Rp. 8.011.038.500	APBD-P
14.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.352.644.900	Rp. 4.685.312.300	APBD-P

Paringin, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,



ERWAN MEGA KARYA LATIEF, SKM, M.Kes
NIP. 19700510 199501 1 001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu perangkat daerah yang menunjang pencapaian misi IV RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada table berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Utama DINSOSPPPAPMD
2023

Sasaran Startegis I					
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58,95%	59,40%	100,76	Sangat Tinggi
Sasaran Startegis II					
Meningkatnya kesetaraan gender	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02	70,03	95,91	Tinggi
Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2 %	52,63%	1,012%	Sangat Tinggi

Sasaran Startegis III					
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status Pembangunan desa	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	28,57%	81,16%	284,07%	Sangat Tinggi

Pada table di atas dapat dijelaskan bahwa dari 4 indikator kinerja utama ada 3 Indikator telah melebihi target dan 1 Indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023 Sangat Tinggi.

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Startegis I	
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	
Indikator Kinerja	Persentase PPKS yang terepenuhi kebutuhan dasarnya

- a. **Perbandingan realisasi Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 2023**

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target kinerja tahun 2023

Sasaran Startegis I				
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS				
No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58,95%	59,40%	100,76

Pada table diatas dapat dilihat bahwa target kinerja dapat dicapai dengan baik dengan capaian 100,76%. Hal ini karena pelaksanaan program didukung dengan anggaran yang didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Indikator Kinerja “Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya” pada Renstra 2021-2026 yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki persentase capaian lebih dari 100%.

Urusan sosial merupakan urusan wajib. Bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah. Saat ini kemiskinan menjadi masalah sosial dan menajdi akar berbagai permasalahan dan mempengaruhi masalah sosial lainnya. Kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi/situasi dimana individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dikarenakan tidak adanya atau rendahnya pendapatan yang diperoleh. Selain itu juga kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, bukan hanya berkaitan dengan materi (ekonomi), tetapi juga pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Oleh sebab itu dalam penanganan kemiskinan perlu kerjasama lintas sektor, bukan hanya dari sisi sosial akan tetapi dari sekto pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, kebudayaan, serta politik. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan pelayanan dan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PKSK terdiri dari 26 jenis dan salah satu kriterianya adalah miskin. Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Mengacu dari 26 jenis PPKS tersebut salah satunya adalah PPKS fakir miskin. Menurut Kemensos pengertian dari fakir miskin adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Fakir miskin ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk dalam masyarakat miskin yang sangat perlu untuk diberikan pelayanan agar meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah 12 jenis. Untuk Kabupaten Balangan dari 26 Jenis PPKS yang ditangani hanya 9 Jenis PPKS, dan hasil Pemuktahiran Data PPKS Tahun 2023 berjumlah 60.942 Orang disajikan pada table berikut.

Tabel 3.3
Data PPKS Kabupaten Balangan

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak Terlantar	33 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	8 Orang
3	Lanjut Usia	3.701 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.129 Orang
5	Korban bencana Alam	21Orang
6	Korban bencana Sosial	37 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	62 Orang
8	Fakir Miskin	54.289 Orang
9	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang
	Jumlah	60.942 Orang

Sumber: Data Dinas Sosial Tahun 2023

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum dikota-kota dan semakin berkembang termasuk dapat ditemui di wilayah Kabupaten Balangan. PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Tabel 3.4
Jumlah PPKS dan Jumlah PPKS yang Terpenuhi Kebutuhannya

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS	Jumlah PPKS yang Tertangani
1	Anak Terlantar	59 Orang	33 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	8 Orang	8 Orang
3	Lanjut Usia	3.701 Orang	284 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.129 Orang	39 Orang
5	Korban bencana Alam	21 Orang	21 Orang
6	Korban bencana Sosial	37 Orang	37 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	62 Orang	52 Orang
8	Fakir Miskin	54.289Orang	35.578 Orang
9	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang	150 Orang
	Jumlah	60.942 Orang	36.202 Orang

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya} &= \frac{\sum \text{Jumlah PPKS dibantu}}{\sum \text{Populasi PPKS di Balangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{36.202 \text{ Orang}}{60.942 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 59,40\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator “Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhannya” tercapai sebesar 59,40% sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan:

- Memberikan pelayanan kepada anak terlantar. Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh dan kebutuhan dasar dan pendidikannya yang tidak dapat terpenuhi. Jumlah anak terlantar di Kabupaten 59 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya Pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orangtuanya atau keluarganya. Tahun 2023 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 33 Orang yang dikirim untuk mengikuti

Pendidikan Pelatihan Keterampilan dan mendapatkan pembinaan dan fasilitas pendampingan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPR SAR) Mulia Satria. Dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang terlantar terutama dari belum terpenuhinya akses Pendidikan yang mereka peroleh, pihak dinas memberikan pelayanan dengan bekerjasama dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar bisa menjadi perpanjangan tangan pihak Kabupaten untuk dapat melakukan penelusuran terhadap anak terlantar yang terdapat di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Selain itu juga langkah yang dilakukan oleh pihak dinas dengan lahirnya inovasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat melaporkan secara segera terkait pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada dilingkungan mereka tanpa perlu datang ke Dinas. Inovasi tersebut diberi nama Layar Sibalang atau Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan. Peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lainnya memberikan dukungan berupa uang saku dan pemberian laptop sebanyak 7 (tujuh) buah terhadap anak-anak yang mendapatkan akses Pendidikan dan tinggal di panti tersebut.

- Memberikan layanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 Tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 8 Orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memberikan pendampingan dan membantu untuk dapat menyelesaikan kasus hukum tersebut, yang mana berupa kasus pelecehan seksual, perilaku menyimpang, dan laka lantas. Dalam memberikan pendampingan tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

- Memberikan layanan terhadap Lanjut Usia Terlantar. Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk Kabupaten Balangan Lanjut Usia terlantar 3.701 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan berupa pemberian sembako kepada 18 orang dari pemerintah daerah, dan 29 Orang dari Kementerian Sosial dan total yang mendapatkan bantuan sembako sebanyak 47 orang. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah pemberian alat bantu lansia yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat lansia sebanyak 8 Buah dari Pemerintah Daerah dan 2 Buah dari Kementerian Sosial yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 10 orang. Selanjutnya pemberian sarana kamar kepada 4 Orang dari Pemerintah Daerah dan 223 Orang dari Kementerian Sosial. Sehingga lansia yang mendapatkan bantuan berupa sembako dan alat bantu lansia sebanyak 284 orang.
- Memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Balangan yaitu 1.240 Orang, selanjutnya layanan yang diperoleh berupa bantuan alat disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk, dan tongkat netra yang mana 48 Buah berasal dari pemerintah daerah dan 10 Buah nberasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya layanan yang diberikan berupa bantuan permakanan sebanyak 600 orang yang berasal dari pemerintah daerah. Sehingga penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan berupa bantuan alat bantu dan permakanan berjumlah 658 orang dengan capaian 53,06%.
- Memberikan layanan kepada korban bencana alam. Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor, dan putting beliung di Kabupaten Balangan

- pada tahun 2023 berjumlah 21 orang, semuanya mendapatkan bantuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
- Memberikan layanan korban bencana sosial. Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 berjumlah 37 orang semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
 - Memberikan layanan terhadap rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena fakta kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah 52 Orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 6 Orang mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti sosial bina wanita dan 46 orang menerima bantuan usaha ekonomi produktif sehingga jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang dibantu sebanyak 52 orang.
 - Memberikan layanan terhadap fakir miskin. Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan jumlah fakir miskin di Kabupaten Balangan 54.289 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Rehab Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu 15 Buah dari Pemerintah Daerah dan 4 Buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 7 Buah

dari Pemerintah Daerah, 11.984 Jiwa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, 21.868 Jiwa mendapatkan bantuan sembako/BPNT, selanjutnya usaha ekonomi produktif sebanyak 54 orang dari pemerintah daerah. Dan Bantuan Santunan Kematian kepada 919 orang, sehingga jumlah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 35.578 jiwa.

- Memberikan layanan kepada Komunitas adat terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, diKabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong yaitu Desa Marajai yang berjumlah sekitar 1.636 jiwa Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu pendampingan terkait sosialisasi komunitas adat terpencil, memberikan pendampingan, pembelian peralatan untuk stimulan sehingga tersedianya sebuah lokasi dan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh komunitas adat terpencil tersebut kepada sebanyak 54 Kepala Keluarga dengan jumlah 150 Orang dengan capaian 9,17%.

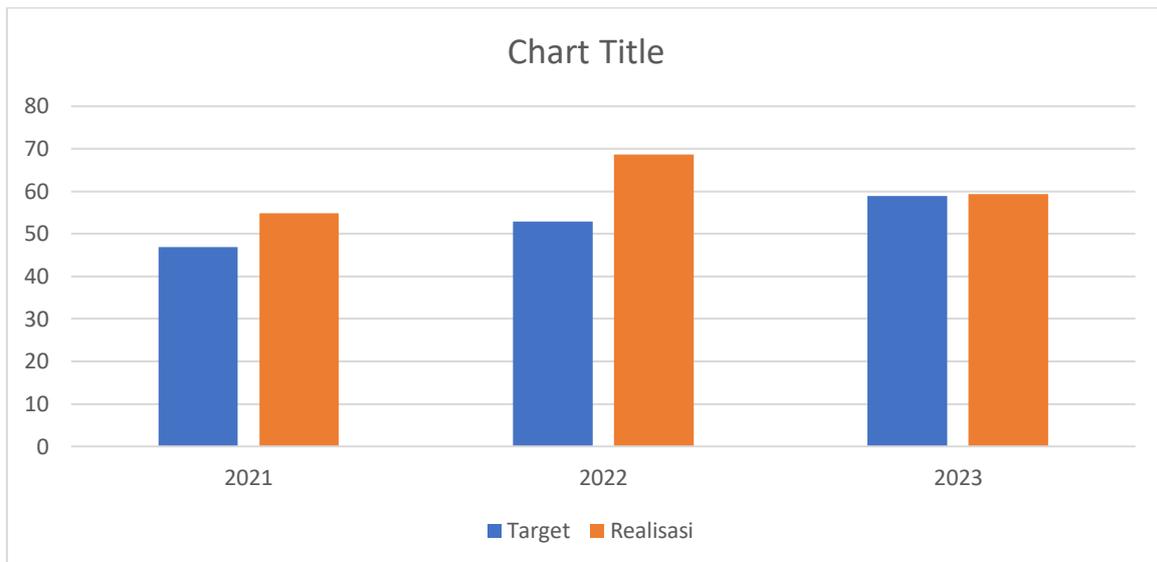
b. Perbandingan realisasi Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 2023

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi dalam beberapa tahun sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	46,95%	54,91%
2022	52,95 %	68,72 %
2023	58,95%	59,40%



Berdasarkan data yang disajikan pada table dan grafik diatas, didapat informasi bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2021-2023 dapat tercapai. Selain itu juga capaian persentase tahun 2021 -2021 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai beriku pada tahun 2021 jumlah PPKS yang terdapat di Kabupaten Balangan sebanyak 96.059 PPKS, selanjutnya PPKS yang tertangani pada tahun 2021 sebanyak 52.749 PPKS. Pada tahun 2022 jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 68.334 PPKS, dengan PPKS yang tertangani sebanyak 46.958 PPKS. Selanjutnya pada tahun 2023 Jumlah PPKS yang terdapat di Kabupaten Balangan berjumlah 60.942 PPKS dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS sebanyak 36.202. Jika dilihat dari basis data jumlah PPKS yang ada di kabupaten Balangan trend yang dapat dilihat dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh definisi dari jenis PPKS sendiri salah satunya Korban Bencana Alam dan Sosial yang dimana jumlah PPKS yang tidak dapat dipastikan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kinerja dari organisasi dengan melakukan pemuktahiran data PPKS yang ada di Kabupaten Balangan,

karena data yang dipakai pada tahun sebelumnya merupakan data yang cukup lama sehingga perlu dilakukan pemuktahiran. Pada tahun 2023 jumlah PPKS yang diberikan pemenuhan kebutuhannya jangkauannya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, salah satu faktornya dapat dilihat pada tahun 2023 jangkauan yang dapat dilakukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas tidak begitu banyak yang dapat dijangkau jika dilihat dari jumlah dari jenis PPKS tersebut.

c. Perbandingan realisasi Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 2023

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan disusun untuk periode perencanaan 2021-2026, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun 3. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun 2023 dengan target akhir Renstra Tahun 2026

NO	IKU	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	59,40%	88,33%	67,24%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa meskipun realisasi kinerja telah mencapai target di tahun 2023, namun jika dibanding dengan target Renstra tahun 2026 masih belum mencapai. Namun demikian melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang cenderung meningkat maka target akhir Renstra optimis

dapat dicapai. Adapun rencana aksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan berusaha mencari dukungan anggaran lain melalui menjalin Kerjasama agar mendapatkan dana CSR dari Perusahaan, berkomunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial agar mendapatkan dukungan anggaran.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain atau Satndar Nasional

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu “ Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan” yang berbeda dengan Indikator DINSOSPPPAPMD Kabupaten Balangan yaitu “Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya” sehingga tidak dapat diperbandingkan. Begitu juga dengan indikator yang digunakan dengan Kementerian Sosial yaitu “ Indeks Kesejahteraan Sosial” sehingga tidak dapat diperbandingkan juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

e. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Program Penanganan Bencana.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 KK	58 Kk	11,6%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	200 Orang	40%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang ikut berpartisipasi dalam Penanganan Bencana	100%	100%	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	31 Orang	29 Orang	93,545

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
--	-------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	--	--

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan:

Keberhasilan: Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan serta didukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam hal ini PSM, Tagana, Karang Taruna yang dimiliki oleh desa dan kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mengalami peristiwa bencana alam dan sosial

Kegagalan: Untuk urusan penanganan bencana tentu bukan sifatnya kegagalan jika target yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Target dibuat berdasarkan perhitungan prediksi namun pada pelaksanaannya tidak dapat dipastikan karena peristiwa bencana alam dan sosial sulit untuk dipastikan berpa target yang ditetapkan.

Solusi: Memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pelayanan dasar yang dilakukan kepada masyarakat yang terdampak peristiwa bencana alam dan sosial.

Penyaluran Bantuan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial



Kegiatan anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan



Tabel 3.7
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100%	100%	100%
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial	100%	100%	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	75 Orang	21,43%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4 Orang	40%
3	Sub Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan	16 Orang	16 Orang	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9 Orang	90%
5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	51 Orang	80,9%
6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	19 Orang	82,60%
7	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan:

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Keberhasilan: Adanya komitmen dari para pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan responsife. Adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi, dan Kementerian untuk memberikan bantuan untuk lansia dan disabilitas sehingga target yang ditetapkan bisa terjawab. Membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah kabupaten dengan para kepala desa se kabupaten balangan dalam penyampaian bantuan kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan.

Kegagalan: Belum optimalnya anggaran yang diberikan untuk mencapai beberapa indikator diatas sehingga belum tercapai, perlunya pemuktahiran data terbaru sehingga target yang dibuat lebih efektif sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Solusi: Tahun 2024 akan melakukan pemuktahiran data sehingga tersedia data urusan rehabilitasi sosial yang siap untuk dapat segera dieksekusi dalam pelaksanaan dilapangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk dapat membantu dalam proses pemuktahiran sehingga didapat data yang valid dan melakukan rakor dengan perwakilan oleh pemerintah desa se kabupaten balangan agar dapat menyaring keluhan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran sehingga tidak terjadi SILPA ataupun salah sasaran.

Penyerahan Alat Bantu untuk Lansia dan Disabilitas



Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Disabilitas dan Lansia



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



Pelayanan Reunifikasi Keluarga



Pemberian Layanan Data dan Pengaduan



Tabel 3.8
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	81%	79,33%	97,93%
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	14,55 %	11,56%	79,45%
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 KK	54 KK	180%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	81%	79,33%	97,93%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	100 %

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	3757 KK	2996 KK	79,74%
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang akan dilaksanakan:

Keberhasilan: Adanya komitmen dari para pegawai untuk dapat bekerja sesuai sasaran yang ingin dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan. Adanya kerjasama yang baik yang dibangun sehingga potensi sumber kesejahteraan sosial dapat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Kegagalan: Masih terdapat miss understanding yang terjadi baik antara PSKS dan Pelaksana di organisasi terkait kedudukan dan fungsi dari masing-masing. Sehingga target yang telah dibuat masih terdapat belum optimal untuk dicapai

Solusi: Mengagendakan rapat evaluasi per triwulan untuk dapat mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dilapangan.



Tabel 3.9
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data PPKS yang valid	69%	65,53%	94,97%
		Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	20%	8%	40%
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin yang terverifikasi	20%	8%	40%
		persentase keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi	1 %	0,45%	45%
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12000 Keluarga	8463 Keluarga	70,52 %
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Keluarga	1002 Keluarga	83,5 %

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

3	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	54 Orang	108%
---	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang akan dilaksanakan:

Keberhasilan: Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Sasaran Startegis “Meningkatnya pemenuhan layanan perlindungan sosial” dengan Indikator “Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial” pada tahun ini realisasi sebesar 65,53% dari target yang dibuat sebesar 69% sehingga persentase capaian kinerja 94,97%. Selanjutnya untuk Indikator “ Meningkatkan kualitas data PPKS “ dengan Indikator Persentase Data PPKS yang valid” dengan target 20% dan realisasi sebesar 8,6% sehingga persentase capaian kinerja 43%.

Capaian Indikator “Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungannya” diperoleh dari Jumlah PPKS Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial di bagi Jumlah PPKS Fakir Miskin x 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah PPKS Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 54.289 Jiwa dan yang fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial berjumlah 35.578 jiwa yang terdiri Bantuan Rumah Fakir Miskin sebanyak 15 Rumah dari Anggaran Pemerintah Daerah dan 4 Rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan KUBE sebanyak 7 kelompok dari Anggaran Pemerintah Daerah. Selanjutnya Bantuan Keluarga PKH dari pemerintah pusat kementrian sosial sebanyak 11.984

Jiwa, Bantuan Sembako/BPNT sebanyak 21.868 jiwa dari pemerintah pusat Kementerian sosial, Bantuan Santunan Kematian sebanyak 919 jiwa, dan Bantuan Kemiskinan BLT Kemiskinan ekstrem 727 Kepala Keluarga.

Kegagalan: Sumber Daya Manusia yang terbatas, terutama dalam pengelolaan data yang sistematis dan berbasis teknologi. Belum banyak masyarakat miskin yang ada dibalangan memiliki usaha ekonomi.

Solusi: Mengajukan permohonan ASN yang berkompeten yang dapat menyajikan sebuah pengolahan data yang sistematis dan berbasis teknologi. Kedepannya akan melakukan jemput bola dan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk mengajak minat berusaha dan memberikan bantuan sosial modal usaha kepada masyarakat miskin.

Bentuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin, Keluarga Penerima Manfaat dan Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



Sasaran Startegis II	
Meningkatnya kesetaraan gender	
Indikator Kinerja	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

a. Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dengan target 2023

Tabel 310
Perbandingan Realisasi Kinerja persentase IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dengan target 2023

Sasaran Startegis II				
Meningkatnya kesetaraan gender				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02	70,03	95,91

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 masih dibawah target karena Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Balangan belum menjadi isu yang menarik dan fokus untuk menjadi perhatian.

b. Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dengan beberapa tahun lalu

$$IDG : 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$$

Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen

IDM = Indeks pengambilan keputusan

linc-dist = Indeks distribusi pendapatan

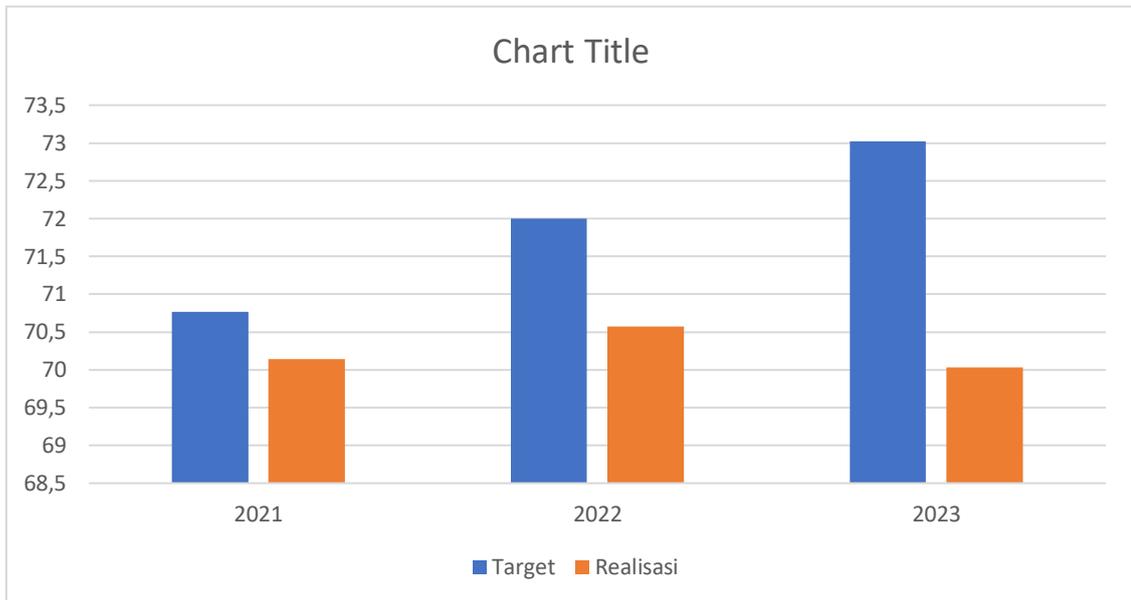
Sumber Data Realisasi IDG diperoleh dari BPS Kabupaten Balangan

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan beberapa Tahun sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	70,77	70,14

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

2022	72	70,57
2023	73,02	70,03



Berdasarkan data dari tabel dan grafik yang disajikan diatas, dapat deskripsikan bahwa untuk realisasi Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten balangan dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi Kesehatan, Pendidikan,dan Ekonomi yang yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. “Indeks Pemberdayaan Gender”. IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan

keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

c. Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) tahun ini dengan target akhir Renstra

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender terhadap target Akhir Renstra Tahun 2026

NO	IKU	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	IDG	70,03	76	92,14%

Dari capaian realisasi indikator kinerja utama tahun 2023 ini sebesar 92,14% dibandingkan dengan target akhir periode Renstras tahun 2026 sebesar 76 masih belum tercapai, maka selanjutnya perlu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja sampai akhir periode Renstra. Sebagai tidnak lanjut untuk mencapai target tahun-tahun berikutnya, antara lain:

- a. Meningkatkan pemberian sosialisasi terkait gender dalam bidang Pembangunan
- b. Melaksanakan pelatihan terhadap organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Perempuan
- c. Meningkatkan forum group discussion terkait peran gender dalam Pembangunan keberlanjutan sehingga dibuatkan kebijakan yang harapannya dapat di angkat menjadi issue penting terkait gender.
- d. Meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Instansi baik vertical dan horizontal.

d. Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) tahun ini Dengan Kabupaten dan Provinsi

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 Balangan diperoleh dari sumber BPS dengan menggunakan data hasil tahun 2022 dengan nilai 70,03 dan jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 77,89 dan Kabupaten Tabalong 74,6. Mengacu pada data tersebut dapat dilihat bahwa jika dibandingkan Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, nilai Kabupaten Balangan masih dibawah dari kedua Kabupaten tersebut.

c. Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) tahun ini Dengan Kabupaten dan Provinsi

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yaitu melalui Program Pengarusutamaan Gender, dan

Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak.

Tabel 3.13
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21.05 %	22,97%	109%
		Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1,3%	1,3%	1,3%
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal Point dan anggaran Berbasis Gender	30 Lembaga Perangkat Daerah	30 Lembaga Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan	25 Orang	25 Orang	25 Orang

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	16,56%	2,16%	13,04%
1	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (rata-Rata)	61 Nilai	82,99 Nilai	136,05%
1	Sub kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Sub Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	79%	95,27%	120,6%
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Layanan	3 Layanan	100%
1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak	30 Orang	30 Orang	100%
1	Kegiatan Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	diTingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang akan dilaksanakan:

Keberhasilan: Adanya komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya semangat dari para pelaksana kegiatan untuk terus menjalin koordinasi baik lintas organisasi baik vertikal maupun horizontal demi sasaran dapat terwujud. Selain itu juga tidak lupa untuk meningkatkan sosialisasi baik kepada pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah agar setiap kegiatan yang disusun juga dapat berbasis gender sehingga pemenuhan dan pelaksanaan gender dalam kegiatan yang disusun oleh pemerintah dapat mengedepankan kesadaran akan kesetaraan. Selain itu didukung juga dengan pembentukan POKJA Pengarusutamaan Gender tingkat Kabupaten.

Kegagalan: Masih terdapat pemahaman yang menganggap bahwa Pembangunan gender bukan menjadi suatu issue yang penting atau yang menarik, sehingga

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

walaupun sudah berjalan kegiatan-kegiatan dilaksanakan tapi belum memiliki pengaruh yang signifikan sehingga menjadi sesuatu yang patut untuk digandeng dan menjadi perhatian.

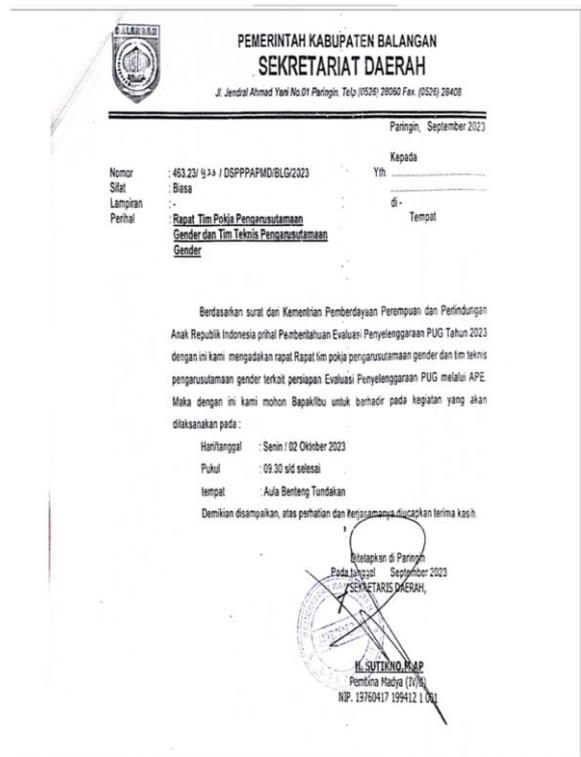
Solusi: Tetap menjalankan apa yang dapat dilakukan dengan tetap terus menjalin komunikasi, koordinasi.

Kegiatan Rapat POKJA Pengarusutamaan Gender



Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	
Indikator Kinerja	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

**Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 2023**



Sasaran Startegis II				
Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2 %	52,63%	1,012%

Berdasarkan data dari tabel di atas, terkait Sasaran ke 2 yaitu “Meningkatnya Upaya perlindungan pada perempuan dan anak” dengan Indikator Kinerja “Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” dengan Target 5,2% dan Realisasi sebesar 52,63% sehingga capaian 1,012%. Upaya penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan suatu sikap konkrit yang dilakukan bagi setiap Masyarakat yang berada di suatu lingkungan agar tidak terjadi sikap atau Tindakan berupa kekerasan yang menjadi sebuah peristiwa pembiasaan yang ada dimasyarakat terutama yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak. Setiap orang wajib untuk berpartisipasi, tidak memandang gender dalam melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak.

Mengacu pada data yang disajikan pada table diatas, melihat realisasi dan capaian kinerja terhadap pengukuran dari sebuah Indikator yang telah disusun yaitu “Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” dengan capaian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu dapat dijelaskan dari pengukuran yang dilakukan terhadap Indikator tersebut. Pengukuran yang digunakan yaitu $\frac{\text{Jumlah Kasus yang terjadi N-1 (Tahun Awal)} - \text{Jumlah Kasus N (Tahun Akhir)}}{\text{Jumlah Kasus yang Terjadi N-1 (Tahun Awal)}} \times 100\%$. Dengan adanya rumus dalam pengukuran indikator diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 19 Kasus yang terdiri dari 8 Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan 11 Kasus Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya pada Tahun 2023 Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan sebanyak 9 Kasus yang terdiri dari 3 Kasus terhadap Perempuan

dan 6 Kasus Kekerasan terhadap anak. Pada penyusunan target kinerja pada tahun 2023 menargetkan bahwa dapat menurunnya kasus kekerasan sebanyak 1 kasus dari data kasus kekerasan yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu 19 kasus pada tahun 2022.

Fenomena yang terjadi terkait perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan Perempuan yaitu masih belum terbukanya Masyarakat dan adanya rasa ketakutan dari Masyarakat untuk dapat melapor terkait kasus kekerasan yang terjadi dilingkungannya. Sebab data yang diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan data yang dihasilkan dari hasil laporan yang masuk dan kemudian ditindaklanjuti untuk dapat menjadi perhatian, pendampingan dan penyelesaian yang adil, sehingga para korban kekerasan dapat segera ditangani terutama berkaitan dengan penanganan pasca kejadian agar dapat mencegah trauma yang parah dan dapat merugikan korban kekerasan tersebut.

Tabel 3.12
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	13.9 Nilai	6,63 Nilai	152,3%
1	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
1	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk	100 %	100 %	100 %
3	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	3 Orang	3 Orang	100%
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak Anak	650 Nilai	655 Nilai	107%
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	3 Organisasi	3 Organisasi	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,			
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapat penguatan	100%	100%	100%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%
	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Buah	1 Buah	100%
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%

	kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6 Orang	60%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Upaya-upaya yang dapat dilakukan yang mempengaruhi keberhasilan dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai organisasi terdepan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Adanya kerjasama lintas sektor, sehingga jika terjadi permasalahan dapat segera tertangani dengan baik
3. Adanya kesadaran pada masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak.
4. Penurunan jumlah kasus anak daripada tahun sebelumnya karena banyaknya usaha preventif atau pencegahan yang pihak intervensi melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mulai ada kesadaran untuk melapor jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak.
5. Penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang dapat diselesaikan di tingkat desa melalui kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan/Kendala:

1. Adanya rasa enggan/malu melaporkan atas kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang , karena beranggapan itu adalah aib.
2. Terutama untuk dapat mengumpulkan peserta sosialisasi terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Desa.
3. Belum aktifnya partisipasi masyarakat baik dewasa, remaja dan anak.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melaksanakan peningkatan kerjasama lintas sektor,

2. Perlunya menyiapkan tenaga yang berkompeten dalam menangani korban tindak kekerasan.

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan



Kegiatan Sosialisasi Advokasi Kekerasan



Kegiatan Sosialisasi Hak-Hak Anak



Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)



Dokumen yang Mendukung terkait Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak



Meningkatnya Klasifikasi Desa	
Indikator Kinerja	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 2023

Sasaran Strategis II				
Meningkatnya Klasifikasi Desa				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju	28,57%	81,16%	284,07%

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

1. Indeks ketahanan sosial terdiri dari : Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan Kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan Kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke Pendidikan dasar dan menengah, akses Pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
4. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi akses ke listrik dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks ketahanan ekonomi terdiri dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan pedagang, akses

distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju	81,16%	44,16%	54,41%

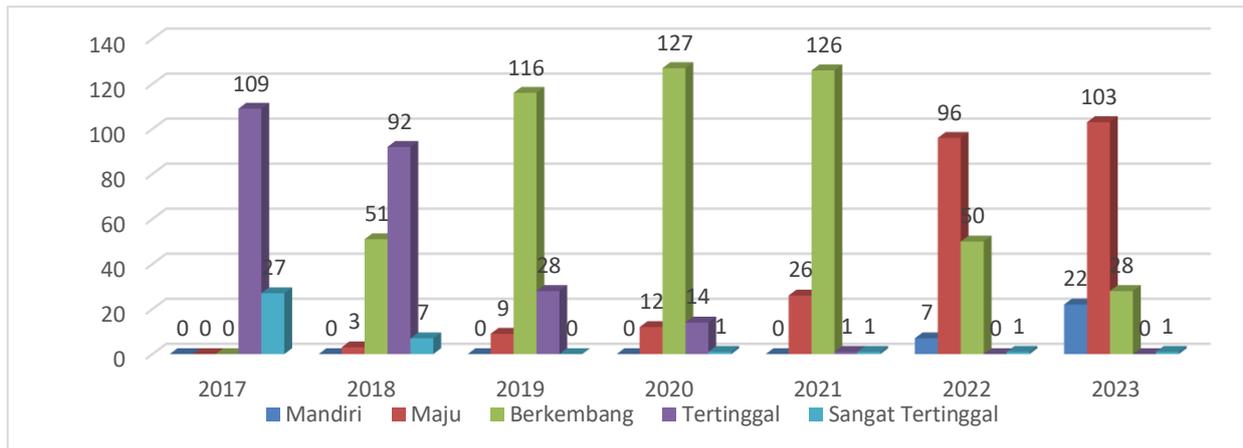
Berdasarkan Indikator kinerja utama yaitu Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju. Pada tahun 2023 Kabupaten Balangan menargetkan 28,57% dengan realisasi 81,16%. Dalam mengukur realisasi dan capaian terhadap indikator berdasarkan indeks desa membangun (IDM) yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan dan 154 Desa. Pada tahun 2023 capaian dari indikator persentase desa dengan klasifikasi maju adalah 284,07%, pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya.

Data Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2022

Tahun	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	JUMLAH
2017	0	0	18	109	27	154
2018	0	3	51	92	7	154

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

2019	0	9	116	28	0	154
2020	0	12	127	14	1	154
2021	0	26	126	1	1	154
2022	7	96	50	0	1	154
2023	22	103	28	0	1	154



Berdasarkan table dan grafik yang telah disajikan diatas bahwa pada tahun 2023 desa dengan klasifikasi maju berjumlah 103 Desa atau meningkat sebanyak 7 Desa dari keadaan tahun 2022. Selain itu juga terjadinya peningkatan dari status desa mandiri pada tahun 2023 terdapat 22 desa dari keadaan tahun 2021 sebanyak 7 Desa dan mengalami peningkatan sebanyak 15 Desa.

Selanjutnya, dapat diketahui pada saat ini jumlah desa dengan klasifikasi minimal maju di Kabupaten Balangan sebanyak 103 Desa dan untuk Desa Mandiri sebanyak 22 Desa. Dalam menghitung realisasi terhadap indikator tersebut adalah jumlah desa dengan klasifikasi maju ditambah dengan klasifikasi desa yang berstatus mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Balangan dikali dengan seratus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

Selanjutnya dengan adanya peningkatan dari status desa yang telah mengalami peningkatan menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai tahun 2023, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal sudah tidak ada dan untuk sangat tertinggal masih terdapat 1 Desa yaitu

Desa Wonorejo di Kecamatan Juai dimana desa tersebut sedang dalam proses penggabungan desa dengan Desa Sumber Rejeki.

DATA DESA DENGAN STATUS DESA BERKEMBANG

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	MUARA NINIAN	JUAI	BERKEMBANG
2	HAMARUNG	JUAI	BERKEMBANG
3	JUAI	JUAI	BERKEMBANG
4	BATA	JUAI	BERKEMBANG
5	GALUMBANG	JUAI	BERKEMBANG
6	SUNGAI BATUNG	JUAI	BERKEMBANG
7	TIGARUN	JUAI	BERKEMBANG
8	PAMURUS	JUAI	BERKEMBANG
9	MARIAS	JUAI	BERKEMBANG
10	Lalayau	JUAI	BERKEMBANG
11	MIHU	JUAI	BERKEMBANG
12	TAWAHAN	JUAI	BERKEMBANG
13	PANIMBAAN	JUAI	BERKEMBANG
14	ANIUNGAN	HALONG	BERKEMBANG
15	MARAJAI	HALONG	BERKEMBANG
16	MAMIGANG	HALONG	BERKEMBANG
17	BAKUNG	BATUMANDI	BERKEMBANG
18	KARUH	BATUMANDI	BERKEMBANG
19	TANAH HABANG KIRI	LAMPIHONG	BERKEMBANG
20	PANAITAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
21	KUSAMBI HULU	LAMPIHONG	BERKEMBANG
22	MATANG LURUS	LAMPIHONG	BERKEMBANG
23	PIMPING	LAMPIHONG	BERKEMBANG
24	PUPUYUAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
25	PARINGIN	PARINGIN	BERKEMBANG
26	DAYAK PITAP	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
27	AJUNG	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
28	KAMBIYAIN	TEBING TINGGI	BERKEMBANG

DATA DESA DENGAN STATUS DESA MAJU

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	BUNTU KARAU	JUAI	MAJU
2	TELUK BAYUR	JUAI	MAJU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

3	GULINGGANG	JUAI	MAJU
4	MUNGKUR UYAM	JUAI	MAJU
5	PANIMBAAN	JUAI	MAJU
6	SUMBER REZEKI	JUAI	MAJU
7	HAUWAI	HALONG	MAJU
8	BANGKAL	HALONG	MAJU
9	MANTUYAN	HALONG	MAJU
10	PUYUN	HALONG	MAJU
11	BUNTU PILANDUK	HALONG	MAJU
12	GUNUNG RIUT	HALONG	MAJU
13	MAMANTANG	HALONG	MAJU
14	BINJAI PUNGGAL	HALONG	MAJU
15	LIYU	HALONG	MAJU
16	BINUANG SANTANG	HALONG	MAJU
17	BINJU	HALONG	MAJU
18	KARYA	HALONG	MAJU
19	UREN	HALONG	MAJU
20	MAUYA	HALONG	MAJU
21	SUMBER AGUNG	HALONG	MAJU
22	BIHARA	AWAYAN	MAJU
23	MERAH	AWAYAN	MAJU
24	PUDAK	AWAYAN	MAJU
25	BADALUNGGGA	AWAYAN	MAJU
26	SIKONTAN	AWAYAN	MAJU
27	PULANTAN	AWAYAN	MAJU
28	TUNDI	AWAYAN	MAJU
29	MUARA JAYA	AWAYAN	MAJU
30	BARU	AWAYAN	MAJU
31	AWAYAN HILIR	AWAYAN	MAJU
32	SEI PUMPUNG	AWAYAN	MAJU
33	BADALUNGGGA HILIR	AWAYAN	MAJU
34	NUNGKA	AWAYAN	MAJU
35	TANGALIN	AWAYAN	MAJU
36	KEDONDONG	AWAYAN	MAJU
37	BARAMBAN	AWAYAN	MAJU
38	AMBAKIANG	AWAYAN	MAJU
39	PIYAIT	AWAYAN	MAJU
40	TARIWIN	BATU MANDI	MAJU
41	MUNJUNG	BATU MANDI	MAJU
42	PELAJAU	BATU MANDI	MAJU
43	RIWA	BATU MANDI	MAJU

44	MAMPARI	BATU MANDI	MAJU
45	BUNGUR	BATU MANDI	MAJU
46	BANUA HANYAR	BATU MANDI	MAJU
47	GUHA	BATU MANDI	MAJU
48	GUNUNG MANAU	BATU MANDI	MAJU
49	KASAI	BATU MANDI	MAJU
50	TANAH HABANG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
51	BATU MERAH	LAMPIHONG	MAJU
52	LAMPIHONG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
53	LAMPIHONG SELATAN	LAMPIHONG	MAJU
54	LAMPIHONG KIRI	LAMPIHONG	MAJU
55	LAJAR	LAMPIHONG	MAJU
56	KUSAMBI HILIR	LAMPIHONG	MAJU
57	LOK HAMA WANG	LAMPIHONG	MAJU
58	KUPANG	LAMPIHONG	MAJU
59	TAMPANG	LAMPIHONG	MAJU
60	LOK PANGINANGAN	LAMPIHONG	MAJU
61	JUNGKAL	LAMPIHONG	MAJU
62	SUNGAI TABUK	LAMPIHONG	MAJU
63	JIMAMUN	LAMPIHONG	MAJU
64	HILIR PASAR	LAMPIHONG	MAJU
65	TELUK KARYA	LAMPIHONG	MAJU
66	SUNGAI AWANG	LAMPIHONG	MAJU
67	KANDANG JAYA	LAMPIHONG	MAJU
68	MUNDAR	LAMPIHONG	MAJU
69	BALANG	PARINGIN	MAJU
70	KALAHIAN	PARINGIN	MAJU
71	PARAN	PARINGIN	MAJU
72	LAYAP	PARINGIN	MAJU
73	MURUNG ILUNG	PARINGIN	MAJU
74	MANGKAYAHU	PARINGIN	MAJU
75	LOK BATUNG	PARINGIN	MAJU
76	LAMIDA BAWAH	PARINGIN	MAJU
77	DAHAI	PARINGIN	MAJU
78	HUJAN MAS	PARINGIN	MAJU
79	BABAYAU	PARINGIN	MAJU
80	BALIDA	PARINGIN	MAJU
81	SUNGAI KETAPI	PARINGIN	MAJU
82	BARUH BAHINU LUAR	PARINGIN SELATAN	MAJU
83	INAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
84	BARUH BAHINU DALAM	PARINGIN SELATAN	MAJU

85	PANGGUNG	PARINGIN SELATAN	MAJU
86	GALUMBANG	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
95	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
96	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
79	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
80	MAYANAU	TEBING TINGGI	MAJU
81	SIMPANG BUMBUN	TEBING TINGGI	MAJU
82	AUH	TEBING TINGGI	MAJU
83	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	MAJU
84	LANGKAP	TEBING TINGGI	MAJU
85	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	MAJU
86	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
95	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
96	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
97	MAYANAU	TEBING TINGGI	
98	SIMPANG BUMBUN	TEBING TINGGI	
99	AUH	TEBING TINGGI	
100	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	
101	LANGKAP	TEBING TINGGI	
102	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	
103	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	

DATA DESA DENGAN STATUS DESA MANDIRI

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
----	-----------	-----------	------------

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

1	SIRAP	JUAI	MANDIRI
2	HUKAI	JUAI	MANDIRI
3	TABUAN	HALONG	MANDIRI
4	HALONG	HALONG	MANDIRI
5	KAPUL	HALONG	MANDIRI
6	SURYATAMA	HALONG	MANDIRI
7	BARUH PANYAMBARAN	HALONG	MANDIRI
8	PADANG RAYA	HALONG	MANDIRI
9	PEMATANG	AWAYAN	MANDIRI
10	AWAYAN	AWAYAN	MANDIRI
11	TUNDAKAN	AWAYAN	MANDIRI
12	BIHARA HILIR	AWAYAN	MANDIRI
13	PUTAT BASIUN	AWAYAN	MANDIRI
14	BATU MANDI	BATU MANDI	MANDIRI
15	MANTIMIN	BATU MANDI	MANDIRI
16	TELUK MESJID	BATU MANDI	MANDIRI
17	TIMBUN TULANG	BATU MANDI	MANDIRI
18	HAMPARAYA	BATU MANDI	MANDIRI
19	SIMPANG TIGA	LAMPIHONG	MANDIRI
20	MATANG HANAU	LAMPIHONG	MANDIRI
21	BUNGIN	PARINGIN SELATAN	MANDIRI
22	MARADAP	PARINGIN SELATAN	MANDIRI

DATA DESA DENGAN STATUS SANGAT TERTINGGAL

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	WONOREJO	JUAI	SANGAT TERTINGGAL

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberadaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);

dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan tersebut diatas Kabupaten Balangan pada tahun 2023 memiliki kenaikan di beberapa status desa serta akan berdampak baik untuk desa tersebut. Secara khusus dan baik bagi Kabupaten Balangan secara umum.

Berikut sampel dari ketahanan sosial yang mengalami kenaikan status desa nya:

1. Kecamatan Awayan Desa Tangalin
 - a. Peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat;
 - b. Kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi;
 - c. Layanan air bersih membaik dan murah
 - d. Jaringan komunikasi lancar dikarenakan pemdes memfasilitasi penyediaan wifi
2. Kecamatan Awayan Desa Pulantan
 - a. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat nilai kesejahteraan meningkat
 - b. Adanya peningkatan Akses pada aspek-aspek ekonomi
 - c. Akses informasi dan komunikasi lancar
 - d. Peningkatan tahap kesehatan masyarakat
 - e. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih makin membaik
 - f. Ketertiban lingkungan membaik karena aktifnya kegiatan linmas
3. Kecamatan Awayan Desa Muara Jaya
 - a. Dengan adanya perbaikan akses pendidikan maka hampir semua anak2 wajib sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang putus sekolah melanjutkan pada tahap kelas paket sesuai jenjang.

- b. Keberdayaan perempuan meningkat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga.
- c. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dikarenakan tersedianya jaringan air bersih dan sadarnya masyarakat terhadap perilaku hidup bersih

Tabel 3.15
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	85%	85%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase SDM pemerintah desa yang kompeten	30%	30%	100%
		Persentase Desa yang memiliki laporan penyelenggaraan desa yang baik	85%	85%	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	154 Dokumen	154 Dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	154 Dokumen	154 Dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	154 Dokumen	154 Dokumen	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	25 Desa	71 Desa	284%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	55%	26,62%	48,4%
	Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	Persentase LKD yang kompeten	60%	27,25%	45,41%
		Jumlah desa yang memiliki pengembangan usaha ekonomi	27 Desa	27 Desa	100%
	Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kegiatan Fasilitasi Konsultasi Penyusunan RKPDes



Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Desa



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 46 Cibinong 16911
Telepon (021) 8752062-63, Faksimili (021) 875 2064 P.O. BOX 46-CBI
Website: <http://www.big.go.id>

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI TEKNIS
KEGIATAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN BALANGAN
No. 19.3/PBW/IGD.04.05/12/2023

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Verifikasi Teknis Hasil Penegasan Batas Desa/Kelurahan pada 71 desa/kelurahan dari 157 desa/kelurahan di Kabupaten Balangan. Adapun hasil verifikasi teknis adalah sebagai berikut:

1. Periode Verifikasi : 18 Juli 2023 s.d. 19 Desember 2023
2. Pengambilan Sampel
 - a. Cara pengambilan sampel : Acak dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas kesalahan 10%
 - b. Jumlah desa/kelurahan yang diverifikasi : 71 desa/kelurahan (daftar terlampir)
 - c. Jumlah sampel desa/kelurahan : 42 desa/kelurahan
3. Metode Penegasan Batas : Kartometrik
4. Kelengkapan Data, Dokumen dan Sumber Data
 - a. Data spasial garis batas format KUGI : Lengkap
 - b. Data spasial titik batas format KUGI : Lengkap
 - c. Data spasial area batas format KUGI : Lengkap
 - d. Peta Batas Desa/Kelurahan : Lengkap
 - e. Kesesuaian sumber data : Sesuai

Kegiatan FGD BUMDES



Sosialisasi terkait Produk Unggulan



3.3 Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp. 44.152.753.567 (empat puluh empat milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Balangan dengan realisasi anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar

Rp.41.092.589.073 (empat puluh satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar 93,07%.

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penunjang Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	1.3219.799.030	12.221.086.369	92,45
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik			
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	265.005.400	255.392.031	99,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	142.700.000	140.416.731	98,4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	122.305.400	114.975.300	94,01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	8.945.233.098	8.124.186.732	90,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	8.853.953.098	8.033.246.432	90,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.905.000	59.793.000	99,81

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.375.000	31.147.300	99,27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000	226.400.000	98,43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80.000.000	78.400.000	98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	148.000.000	98,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	23.93.215.800	23.74.869.014	99,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.114.300	11.114.300	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	123.650.500	118.930.000	96,18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	65.574.400	65.457.805	99,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.200.000	2.760.000	20,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.179..676.600	2.176.606.909	99,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.417.532	628.808.031	85,04

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	284.100.000	191.333.427	67,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.317.532	437.474.604	96,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.927.200	611.430.561	94,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	286.802.100	257.718.208	89,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	360.125.100	353.712.353	98,22
URUSAN SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	4.202.610.200	4.195.445.200	99,83
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	15.300.000	15.280.000	99,87
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15.300.000	15.280.000	99,87
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	-	-	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Terpenuhi Kapasitasnya	4.187.310.200	4.180.165.200	99,83
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	219.200.000	219.190.000	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	69.250.000	64.650.000	93,36

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	112.700.000	112.700.000	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3.786.160.200	3.783.625.200	99,93
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	394.108.200	333.356.600	84,59
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial	394.108.200	333.356.600	84,59
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100.097.500	62.856.700	62,8
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48.167.600	48.069.200	99,8
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.324.800	44.577.600	86,85
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.072.900	23.082.500	67,74

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	88.536.800	84.200.000	95,1
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11.214.900	10.344.900	92,24
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.693.700	60.225.700	99,23
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data PPKS yang valid	2.515.651.537	2.208.682.000	87,8
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin yang terverifikasi	2.515.651.537	2.208.682.000	87,8
	persentase keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi aktif			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	119.071.000	117.744.000	98,89
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.779.464.437	1.474.922.500	82,89
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	617.116.100	616.015.500	99,82
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	566.993.600	554.873.800	97,86

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	249.804.800	244.844.800	98,01
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	249.804.800	244.844.800	98,01
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang ikut berpartisipasi dalam Penanganan Bencana	317.188.800	310.029.000	97,74
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	317.188.800	310.029.000	97,74
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	89.297.600	84.916.800	95,09
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	89.297.600	84.916.800	95,09
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	851.929.700	778.859.124	91,42
	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten			
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal Point dan anggaran Berbasis Gender	108.393.400	105.035.400	96,9
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24.736.400	23.112.400	93,43
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi	83.657.000	81.923.000	97,93

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi masyarakat	743.536.300	673.823.724	90,62
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	743.536.300	673.823.724	90,62
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	72.244.400	63.941.700	88,51
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	44.019.600	38.606.900	87,7
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.019.600	38.606.900	87,7
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk	28.224.800	25.334.800	89,76
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	28.224.800	25.334.800	89,76

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	159.045.900	158.815.900	99,86
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	99.973.100	99.793.100	99,82
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	99.973.100	99.793.100	99,82
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	59.072.800	59.022.800	99,92
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	59.072.800	59.022.800	99,92
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak	62.182.400	58.739.200	94,46
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan	62.182.400	58.739.200	94,46

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	34.959.200	34.739.200	99,37
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	27.223.200	24.000.000	88,16
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak Anak	157.283.200	153.643.600	97,69
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak	89.531.200	88.241.200	98,56
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	89.531.200	88.241.200	98,56
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapat penguatan	67.752.000	65.402.400	96,53
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51.836.000	50.756.000	97,92
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.916.000	14.646.400	92,02

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	90.027.200	73.124.874	81,23
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	17.346.400	17.346.400	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.346.400	17.346.400	100
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan minimal	62.404.400	45.502.074	72,91
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	62.404.400	45.502.074	72,91
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	10.276.400	10.276.400	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.276.400	10.276.400	100

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

URUSAN PMD				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang terimplementasi	9.075.229.800	8.082.165.615	89,06
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang memiliki MoU/kerjasama	9.075.229.800	8.082.165.615	89,06
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9.075.229.800	8.082.165.615	89,06
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	8.011.038.500	7.686.172.900	95,94
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	8.011.038.500	7.686.172.900	95,94
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	5.056.128.000	5.013.414.000	99,16
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	34.008.000	33.754.800	99,26
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	179.984.800	118.064.800	99,78
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	440.339.600	431.609.600	98,02
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.391.084.800	1.186.607.200	85,3
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	175.516.400	125.938.400	71,75
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	51.634.800	43.834.800	84,89
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	659.342.100	656.429.300	99,56

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.000.000	15.000.000	65,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	4.685.312.300	4.438.765.391	94,74
	Jumlah desa yang memiliki pengembangan usaha ekonomi			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKD yang kompeten	4.685.312.300	4.438.765.391	94,74
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	675.734.300	672.871.841	99,58
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.188.944.300	203.7034.300	93,06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	94.627.000	87.357.000	92,32

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.726.006.700	1.641.502.250	95,1
JUMLAH		44.152.753.567	41.092.589.073	93,07

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Tabel 3.41
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	100%	92,45	92,45
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	99,37	99,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	98,4	98,4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	100%	94,01	94,01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	90,82	90,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	90,73	90,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	99,81	99,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	99,27	99,27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98,43	98,43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	98	98

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	98,67	98,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	99,23	99,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	96,18	96,18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	99,82	99,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	20,91	20,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,86	99,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85,04	85,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	67,35	67,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	96,08	96,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,51	94,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	89,86	89,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	98,22	98,22
URUSAN SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	97,93%	99,83	101,94
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	79,45%	99,87	125,7

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	180%	99,87	55,48
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan		-	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Terpenuhi Kapasitasnya	97,93%	99,83	101,9
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	93,36	93,36
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,93	99,93
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100	84,59	84,59
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial	100	84,59	84,59
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	21,43%	62,8	29,30
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40%	99,8	249,5
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	86,85	86,85
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	67,74	75,26

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80,9%	95,1	117,55
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	82,60%	92,24	11,6%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		99,23	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data PPKS yang valid	94,97%	87,8	92,45
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin yang terverifikasi	40%	87,8	219,5
	persentase keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi aktif			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	70,52 %	98,89	140,22
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83,5 %	82,89	99,26
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108%	99,82	92,42
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	97,86	97,86
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	11,6%	98,01	844,91
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40%	98,01	245
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang ikut berpartisipasi dalam Penanganan Bencana	100	97,74	97,74

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	93,54	97,74	104,49
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100	95,09	95,09
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	100	95,09	95,09
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100	91,42	91,42
	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	109%		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal Point dan anggaran Berbasis Gender	100	96,9	96,9
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	93,43	93,43
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	97,93	97,93
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan	100	90,62	90,62
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	90,62	90,62
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	152,3%	88,51	58,11
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada	100	87,7	87,7

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	87,7	87,7
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk	100	89,76	89,76
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	89,76	89,76
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinannya pertamanya dibawah 18 tahun	13,04	99,86	765,8
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	136,05%	99,82	73,37
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,82	99,82
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	100%	99,92	99,92
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	99,92	99,92
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak	100%	94,46	94,46
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan	100%	94,46	94,46
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	99,37	99,37

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	88,16	88,16
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak Anak	107%	97,69	91,29
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak	100%	98,56	98,56
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100%	98,56	98,56
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapat penguatan	100%	96,53	96,53
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	97,92	97,92
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	92,02	92,02
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100%	81,23	81,23
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	100	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan minimal	100	72,91	72,91
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	60	72,91	121

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	100%	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100
URUSAN PMD				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang terimplementasi	-	89,06	0
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang memiliki MoU/kerjasama		89,06	0
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	89,06	0
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%	95,94	95,94
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	100%	95,94	95,94
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	100%	99,16	99,16
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	100%	99,26	99,26
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100%	99,78	99,78
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	98,02	98,02
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100%	85,3	85,3
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	71,75	71,75
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100%	84,89	84,89

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	284	99,56	35,05
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	65,22	65,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif	48,4%	94,74	195,74
	Jumlah desa yang memiliki pengembangan usaha ekonomi	45,41%		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKD yang kompeten	100%	94,74	94,74
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	99,58	99,58
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	93,06	93,06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	92,32	92,32
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	95,1	95,1

Berdasarkan data diatas, untuk perencanaan penganggaran dimasa datang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan perlu tetap berfokus pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam hal pelayanan dasar, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait untuk dapat diberikan dukungan agar Program yang belum tercapai mendapat dukungan dan terjalannya kolaborasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan termasuk kategori Sangat Tinggi, yaitu 1 (satu) indikator berkategori tinggi, dan 3 (tiga) indikator kinerja yang berkategori Sangat Tinggi yaitu Indikator kinerja:

1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3. Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju

Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adalah "Sangat Tinggi" secara jelasnya (empat) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi yaitu sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya PPKS yang terpenuhinya kebutuhan dasar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58,95%	59,40%	100,76	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesetaraan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02	70,03	95,91	Tinggi

Meningkatnya upaya perlindungan pada Perempuan dan anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,2 %	52,63%	1,012%	Sangat Tinggi
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik sehingga mendukung status Pembangunan desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	28,57%	81,16%	284,07%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jika melihat dari beberapa capaian kinerja telah menunjukkan capaian yang Sangat baik dengan capaian Sangat Tinggi. Namun memang dalam melaksanakan pelayanan dasar terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentu memiliki kendala. Hal tersebut terdiri dari masih belum tersistemnya data PPKS yang ada di Kabupaten Balangan serta belum dilaksanakannya pemuktahiran terhadap data yang tersedia saat ini dan mengoptimalkan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan terhadap pemerlu pekayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Selanjutnya dari segi pemberdayaan perempuan masih adanya pragmatis yang ada dimasyarakat yang memiliki pandangan bahwa wanita tidak boleh berdaya dan hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan bersifat kemasyarakatan dan sosial, peristiwa kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih banyak yang ditutup-tutupi oleh Masyarakat jika hal tersebut terjadi dilingkungan mereka tempat. Selain itu dari segi pemberdayaan masyarakat dan desa pola pikir yang masih belum terbuka yang mengakibatkan setiap kegiatan untuk

**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

mendukung kegiatan masyarakat yang berbasis ekonomi hadir di dalam Masyarakat sehingga dapat menjadi capaian indikator pemenuhan dari status sebuah desa.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun demikian, untuk tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance* . Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut

1. Meningkatkan dan melanjutkan kerjasama dengan stakeholders/instansi terkait
2. Memperluas sasaran sosialisasi yang dilaksanakan, sehingga diharapkan menyentuh seluruh elemen/lapisan masyarakat.
3. Lebih meningkatkan /mempertajam program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga lebih tepat sasaran.
4. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, agar kegiatan yang benar-benar memerlukan support secara pendanaan lebih tercover sehingga peningkatan kinerja dapat tercapai.

Paringin, Januari 2024

Kepala Dinas,



ERWAN MEGA KARYA LATIEF, SKM, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197005101995011001